

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* Terhadap Pelayanan Publik di Kantor Camat Plampang Kabupaten Sumbawa, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Beberapa prinsip good governance sudah terlaksana di Kantor Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.
 - a. Terlaksananya prinsip transparansi dibuktikan dengan masyarakat telah diberikan informasi secara terbuka terkait persyaratan yang harus dilengkapi saat mengurus administrasi. Namun, di sisi lain prinsip transparansi ini belum terlaksana dengan maksimal, misalnya pada penyediaan papan informasi tentang alur pelayanan, biaya administrasi pelayanan, dan papan struktur organisasi kantor.
 - b. Pada pelaksanaan prinsip akuntabilitas juga secara umum dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan pertanggung jawaban yang diberikan oleh pihak pegawai kecamatan atas segala kelalaian yang dilakukan selama memberikan pelayanan.
 - c. Terakhir, berbeda dengan dua prinsip sebelumnya, pelaksanaan prinsip efektivitas pada kantor kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa belum terlaksana dengan baik. hal ini berkaitan dengan kedisiplinan beberapa

pegawai kantor kecamatan dalam memberikan pelayanan. Misalnya, ada beberapa pegawai yang datang terlambat serta pulang sebelum waktu kerja berakhir, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan saat itu tidak dapat menyelesaikan urusannya sesuai waktu yang diharapkan.

2. Secara umum pelaksanaan beberapa prinsip good governance di Kantor Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa sudah terlaksana dengan baik. Namun, beberapa prinsip tersebut belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa faktor penghambat. Adapun faktor-faktor penghambat terlaksananya prinsip-prinsip good governance diantaranya.

- a. masih ada beberapa pegawai yang belum memahami prinsip-prinsip pelaksanaan good governance. Misalnya terkait dengan prinsip transparansi, masih ada pegawai tidak terbuka tentang biaya pelaksana yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu berapa rincian yang seharusnya dikeluarkan pada saat melakukan pengurusan tentang administrasi kependudukan dan juga tidak ada kejelasan tentang waktu penyelesaian administrasi dokumen sehingga masyarakat merasa kebingungan terkait biaya dan waktu administrasi di kantor tersebut.
- b. tidak adanya pelatihan khusus atau sosialisasi terkait penerapan prinsip-prinsip good governance secara berkala yg diselenggarakan oleh pemerintah setempat. Hal ini menyebabkan beberapa pelayanan dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

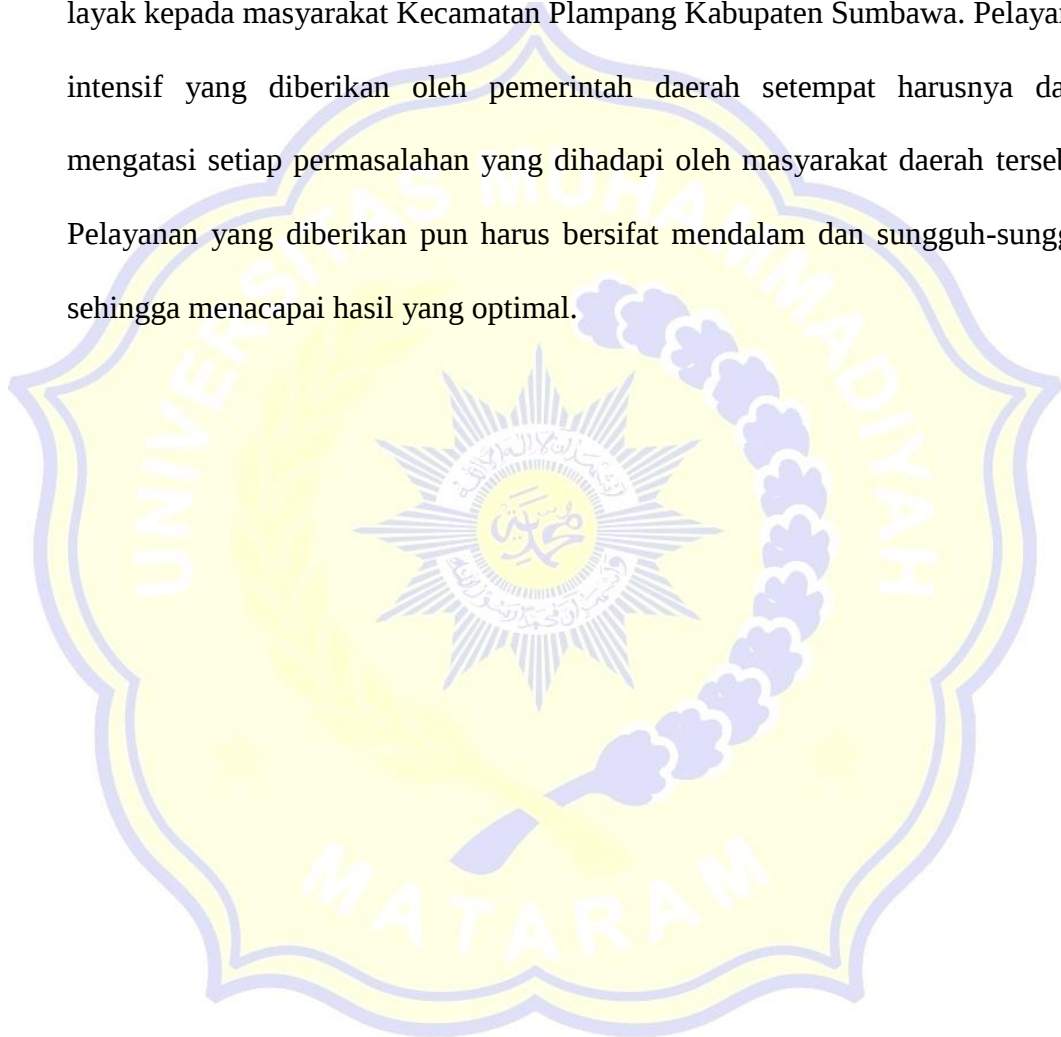
c. latar belakang sebagian besar masyarakat Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa adalah petani dan peternak, sehingga beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan terkait pelaksanaan program pemerintah tidak dapat diikuti oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui informasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, sehingga prinsip transparansi tidak terlaksana dengan maksimal.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran yaitu :

1. Pemerintah diharapkan memberikan perhatian yang lebih kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan sehingga penerapan prinsip *good governance* dalam meningkatkan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan baik guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
2. menerima dan menindaklanjuti setiap permasalahan yang dilaporkan oleh masyarakat.
3. pemerintah setempat juga diharapkan tetap menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan masyarakat ataupun instansi-instansi lain yang ada di daerah setempat. Misalnya bekerja sama dalam pengambilan keputusan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan, bekerja sama dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai-nilai kearifan lokal, bekerja sama dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga, dll.

4. Diharapkan pihak pelaksana mampu memberikan pemahaman tentang pentingnya dalam mengurus dokumen kependudukan salah satunya akta kelahiran dan pengurusan akta jual beli tanah.
5. Pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan intensif yang sesuai dan layak kepada masyarakat Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa. Pelayanan intensif yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat harusnya dapat mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat daerah tersebut. Pelayanan yang diberikan pun harus bersifat mendalam dan sungguh-sungguh sehingga menacapai hasil yang optimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2002. *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek*. Edisi revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Basri. 2007. *Kepemimpinan yang Baik dalam Mewujudkan Good Governance*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Duarmas,dkk.2016.*Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kormomolinkabupaten Maluku Tenggara Barat. Jurnal:Universitas Sam Ratulangi*.
- Gie, The Liang.2007. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty
- Hasibuan. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismayanti. 2021. *Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jurnal fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah makassar* hal.1-6,7- 9,dan 35. Diakses melalui <https://digilibadmin.unismuh.ac.id>. pada 6 september 2021
- Kartini. 2011. *Perilaku Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Parsada
- Kartono. 2011. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo Parsada.
- Krina. L.P.L. 2003. *Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi*. Jakarta: Badan Peencanaan Pembangunan Nasional.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nariyah. 2021.*Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: CV. Syntax Computama.
- Riduwan, M.B.A. 2010. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*.
- Rivai, Veithzal. 2009. *Perilaku Organisasi dan Teori Kepemimpinan Jilid II*. Jakarta: PT. Salemba.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung:CV Mandar Maju.

- Sedarmayanti. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Refika Aditama Eresco
- Sinambela. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumianti. 2009. *Asuhan Keperawatan pada Klien Penyalahgunaan & Ketergantungan NAPZA*. Jakarta: Trans Info Media.
- Suyanto Bagong & Sutinah. 2005 *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Syakrani dan Syahrani. 2019. *Good Governance*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wiersma. 2011. "Trianggulasi", dalam Sugiyono, *metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wahjosumidjo. 2002. *Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik Dan Permasalahannya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cambel. 1989. *Riset dalam Efektivitas Organisasi, Terjemahan Salut Simamora*, Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang No 16 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



Gambar 2: struktur organisasi kantor camat plampang kabupaten sumbawa masih belum dipajang



Gambar 3: tempat pelayanan pada Kantor Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa





Gambar 4: Wawancara dengan bapak camat sekaligus sekcam plampang.





Gambar 5: Wawancara dengan pegawai bidang pelayanan umum dan kepegawaian sekaligus bagian seksi kecamatan plampang





Gambar 6: kegiatan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat di kantor Desa sepayang luar





Gambar 7: wawancara dengan masyarakat kecamatan plampang kabupaten sumbawa





Gambar 8: wawancara dengan masyarakat kecamatan plampang kabupaten sumbawa

